Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
UAKPA
005.01.578850
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2022

Jl. Prof. Moh. Yamin. No. 52

Palu, Sulawesi Tengah 94231

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, 31 Desember 2022
Sekretaris,

Hj. Sitti Junaedah, SE.
NIP. 19670712 199203 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Pernyataan Tanggung Jawab		iv
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	1
III.	Laporan Operasional	2
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	2
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	3
	A. Penjelasan Umum	9
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	52
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	66
VI.	Lampiran dan Daftar	

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Moh. Yamin Nomor 52 Palu PALU Sulawesi Tengah 94121

Telp. 0451 483385 Fax. 0451- 483385 e-mail : ptun.palu@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tingkat UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 31 Desember 2022
Sekretaris,

Hj. Sitti Junaedah, SE.
NIP. 19670712 199203 2 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada T.A 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 231.974.950,- atau mencapai 1.772 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 13.094.000,-.
Realisasi Belanja Negara pada T.A 2022 adalah sebesar Rp. 13.079.289.405,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.106.377.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 37.514.657.084; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 9.702.443; Kewajiban Jangka Pendek (neto) sebesar Rp.55.900; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 37.514.657.084; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 30.430.746.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.55.900,- dan Rp. 37.514.601.184,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 15.424.950, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 5.319.542.093,-, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.304.117.143). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. (3.305.985.072) dan Rp. 8.610.102.215 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (8.610.102.215,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.33.172.660.294,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp.(8.610.102.215) kemudian ditambah dengan selisih revaluasi aset tetap Rp.0,-, kemudian ditambah koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp.(0), kemudian ditambah koreksi atas reklasifikasi senilai Rp.(2.682.600) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp.12.954.725.705,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.37.514.601.184,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-22		% thd Angg	2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	13.094.000	231.974.950	**1771,61**	87.854.400
JUMLAH PENDAPATAN		**13.094.000**	**231.974.950**	**1771,61**	**87.854.400**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.281.313.000	3.266.146.846	99,54	3.169.619.126
Belanja Barang	B.4	1.813.445.000	1.813.177.184	99,99	1.328.839.758
Belanja Modal	B.5	8.011.619.000	7.999.965.375	99,85	314.937.000
JUMLAH BELANJA		**13.106.377.000**	**13.079.289.405**	99,79	**4.813.395.884**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-22	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	9.702.443	15.253.807
Jumlah Aset Lancar		9.702.443	15.253.807
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	28.200.151.000	28.200.151.000
Peralatan dan Mesin	C.15	2.737.437.320	2.834.167.320
Gedung dan Bangunan	C.16	1.105.789.200	5.354.709.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	95.350.000	95.350.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	15.254.000	15.254.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	7.963.125.375	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2.642.583.000)	(3.326.399.933)
Jumlah Aset Tetap		37.474.523.895	33.173.231.387
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	391.929.000	118.651.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(361.498.254)	(118.651.000)
Jumlah Aset Lainnya		30.430.746	-
JUMLAH ASET		**37.514.657.084**	**33.188.485.194**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	55.900	15.824.900
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		55.900	15.824.900
JUMLAH KEWAJIBAN		55.900	15.824.900
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	37.514.601.184	33.172.660.294
JUMLAH EKUITAS		37.514.601.184	33.172.660.294
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**37.514.657.084**	**33.188.485.194**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-22	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	15.424.950	13.987.200
JUMLAH PENDAPATAN		**15.424.950**	**13.987.200**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.266.146.846	3.169.619.126
Beban Persediaan	D.3	46.679.017	46.643.603
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.368.951.470	754.644.568
Beban Pemeliharaan	D.5	232.416.461	457.719.243
Beban Perjalanan	D.6	152.230.000	71.780.800
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	253.118.299	374.602.358
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**5.319.542.093**	4.875.009.698
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.304.117.143)	(4.861.022.498)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		216.550.000	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(3.522.535.072)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.305.985.072)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.610.102.215)	(4.861.022.498)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(8.610.102.215)**	**(4.861.022.498)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-22	2021
EKUITAS AWAL	E.1	33.172.660.294	33.234.084.108
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.610.102.215)	(4.861.022.498)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(2.682.600)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.6	(2.682.600)	-
JUMLAH		**(2.682.600)**	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12.954.725.705	4.799.598.684
EKUITAS AKHIR	E.5	**37.514.601.184**	**33.172.660.294**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Tahun 2022 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2022 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tahun 2010 sampai dengan 2022 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah .

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Rencana Penyelesaian Perkara
- Peningkatan aksebilitas Putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- Peningkatan Kepatuhan hterhadap Putusan Pengadilan
- Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
    - Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
    - Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
    - Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (peradilan)
    - Pendapatan Ongkos Perkara
    - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
    - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
    - Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah

dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan

kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	13.094.000	13.094.000
Jumlah Pendapatan	**13.094.000**	**13.094.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	3.281.313.000	3.281.313.000
Belanja Barang	1.813.445.000	1.813.445.000
Belanja Modal	8.011.619.000	8.011.619.000
Jumlah Belanja	**13.106.377.000**	**13.106.377.000**

Realisasi Pendapatan Rp.231.974.950

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 231.974.950 atau mencapai 1.772 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.13.094.000,-. Pendapatan di yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	13.094.000	231.974.950	1.771,61
Jumlah	**13.094.000**	**231.974.950**	1.771,61

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,78% dibandingkan realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Pendapatan T.A 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
PNBP	231.974.950	13.987.200	1558,48
Jumlah	**231.974.950**	**13.987.200**	**1558,48**

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Negara Rp. 13.079.289.405

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 13.079.289.405,- atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp. 13.106.377.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.281.313.000	3.266.146.944	99,54
Belanja Barang	1.813.445.000	1.813.177.184	99,99
Belanja Modal	8.011.619.000	7.999.965.375	99,85
Total Belanja Kotor	**13.106.377.000**	**13.079.289.503**	99,79
Pengembalian Belanja	-	(98)	
Total Belanja	**13.106.377.000**	**13.079.289.405**	99,79

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

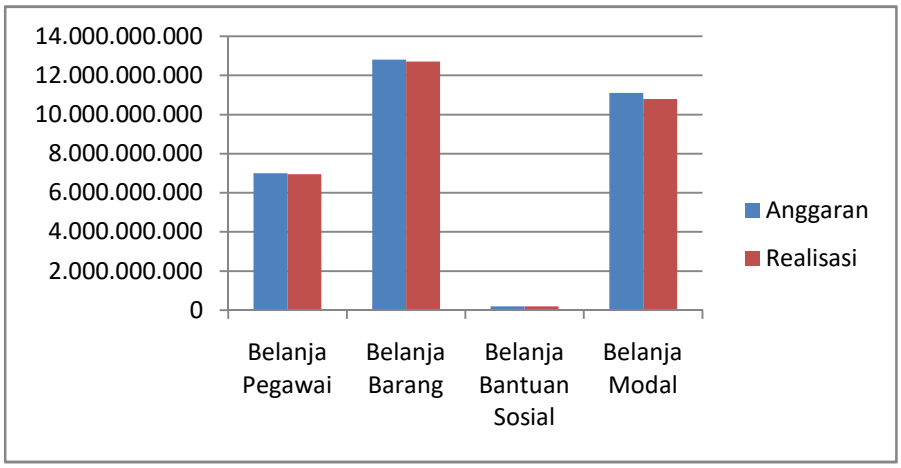

Realisasi Belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 171% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2021. Hal ini disebabkan karena Pagu Anggaran Tahun 2022 lebih besar dibanding Pagu Anggaran Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja TAHUN 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.266.146.846	3.169.619.126	3,05
Belanja Barang	1.813.177.184	1.328.839.758	36,45
Belanja Modal	7.999.965.375	314.937.000	2.440,18
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**13.079.289.405**	**4.813.395.884**	**171,73**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp. 3.266.146.846,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.266.146.846,- dan Rp.3.169.619.126. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,05%.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**3.266.146.846**	**3.169.619.126**	**3,05**
Belanja Gaji Pokok PNS	1.170.552.340	1.105.884.120	5,85
Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.803	15.924	11,80
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	69.018.188	60.045.220	14,94
Belanja Tunjagan Anak PNS	21.213.710	19.356.506	9,59
Belanja Tunjangan Struktural PNS	40.320.000	40.320.000	-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.403.845.000	1.397.140.000	0,48
Belanja Tunjangan PPh PNS	179.337.803	192.296.750	(6,74)
Belanja Tunjangan Beras PNS	61.919.100	55.980.660	10,61
Belanja Uang Makan PNS	206.633.000	193.745.000	6,65
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.390.000	7.820.000	71,23
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	99.900.000	97.200.000	2,78
Belanja Uang Lembur	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	**3.266.146.944**	**3.169.804.180**	3,04
Pengembalian Belanja Pegawai	(98)	(185.054)	(99,95)
Jumlah Belanja	**3.266.146.846**	**3.169.619.126**	**3,05**

Belanja Barang

Rp.1.813.177.184

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.813.177.184 dan Rp.1.317.798.422. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 37,32% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2021. Hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya kebutuhan belanja barang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	705.516.550	566.648.175	24,51
Belanja Barang Non Operasional			#DIV/0!
Belanja Jasa	681.945.100	176.915.306	285,46
Belanja Pemeliharaan	213.486.000	438.836.626	(51,35)
Belanja Perjalanan Biasa	146.830.000	66.380.800	121,19
Belanja Perjalanan Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	-
Belanja Barang untuk persediaan	59.999.534	66.258.851	(9,45)
Jumlah Belanja Kotor	**1.813.177.184**	**1.320.439.758**	**37,32**
Pengembalian Belanja	(98)	-	
Jumlah Belanja	**1.813.177.086**	**1.320.439.758**	**37,32**

Belanja Modal

Rp.7.999.965.375

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.999.965.375,- dan Rp.314.937.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 2022 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 2.440%, hal ini disebabkan karena

pada TA 2022 tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	T.A. 2022	T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.840.000	314.937.000	(88,30)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.963.125.375	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**7.999.965.375**	**314.937.000**	**2440,18**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**7.999.965.375**	**314.937.000**	**2440,18**

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal T.A 2022 dan 2021 tidak mengalami kenaikan dan penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	2022	2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2022 adalah sebesar Rp.36.840.000,-, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2022 dan 2021 mengalami penurunan sebesar (88,30%), hal ini disebabkan karena pagu anggaran belanja modal pada TA 2022 lebih sedikit dibanding dengan pagu anggaran belanja modal TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.840.000	314.937.000	-88,30
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**36.840.000**	**314.937.000**	**-88,30**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal T.A 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.963.125.375,- dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal T.A 2022 mengalami peningkatan sebesar 100%, hal ini disebabkan karena pada TA 2021 tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.963.125.375	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**7.963.125.375**	**0**	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	**7.963.125.375**	**0**	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Realisasi Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan TA 2022 tidak mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini disebabkan karena pada TA 2022 dan TA 2021 tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	2021	2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal T.A 2022 dan 2021 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena DIPA 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terdapat Belanja Modal lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2022	2021
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Kwitansi yang belum diSP2Dkan	-	
Jumlah	**-**	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal T.A 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	2022	2021
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal T.A 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasadalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan 2021

Keterangan	2022	2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang PNBP Rp.0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal T.A 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian

Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Bagian Lancar TP/TGR Rp.0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal T.A 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2022 dan 2021

No	Nama	T.A 2022	2021
1		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Bagian Lancar TPA Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal T.A 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	2022	2021
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar Tahun 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp.0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal T.A 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Jenis	2022	2021
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Web Hosting	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal T.A 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2022 dan 2021

Jenis	2022	2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.10 Persediaan

Persediaan Rp.9.702.443

Nilai Persediaan per T.A 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.9.702.443,- dan Rp.15.252.807,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per T.A 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2022 dan 2021

Persediaan	2022	2021
Barang Konsumsi	9.702.443	15.253.807
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**9.702.443**	**15.253.807**

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Rp.0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per T.A 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal T.A 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tahun 2022 dan 2021

No	Debitur	2022	2021
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan Angsuran

Rp.0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian TPA untuk T.A 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	2022	2021
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tahun 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14 Tanah

Tanah Rp.28.200.151.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palu per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.28.200.151.000 dan Rp.28.200.151.000 .

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**Rp**	**28.200.151.000**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**28.200.151.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**Rp**	**28.200.151.000**

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp. 2.737.437.320

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.2.737.437.320,- dan Rp.2.834.167.320. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**Rp**	**2.834.167.320**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	161.620.000
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(258.350.000)
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**2.737.437.320**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(2.427.704.122)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**Rp**	**309.733.198**

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp.1.105.789.200

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.1.105.789.200,- dan Rp.5.354.709.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**5.354.709.000**
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Gedung / KDP	1.857.495.118
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan/Revaluasi Aset/Henti Guna	(6.106.414.918)
Saldo per 31 Desember 2022	**1.105.789.200**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(166.815.874)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**938.973.326**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.95.350.000

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.95.350.000 dan Rp.95.350.000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi dan jaringan listrik.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**95.350.000**
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Jaringan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2022	**95.350.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(32.999.004)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**62.350.996**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp.15.254.000

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.15.254.000 dan Rp.15.254.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**15.254.000**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2022	**15.254.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(15.064.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**190.000**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 7.963.125.375

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.963.125.375. dan Rp.0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	-	7.974.619.000	100	7.963.125.375	-
2	-	-	0	0	-
	Jumlah	**7.974.619.000**		**7.963.125.375**	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (2.642.583.000)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.(2.642.583.000) dan Rp.(3.326.399.933). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
2	Peralatan dan Mesin	Rp 2.737.437.320	Rp (2.427.704.122)	Rp 309.733.198
3	Gedung dan Bangunan	Rp 1.105.789.200	Rp (166.815.874)	Rp 938.973.326
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 95.350.000	Rp (32.999.004)	Rp 62.350.996
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 15.254.000	Rp (15.064.000)	Rp 190.000
Akumulasi Penyusutan		**Rp 3.953.830.520**	**Rp (2.642.583.000)**	**Rp 1.311.247.520**

Aset Tak Berwujud Rp. 114.605.000

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.114.605.000 dan Rp.114.605.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	0
ATB Lainnya	0
	0

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**114.605.000**
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**114.605.000**
Amortisasi s/d 31 Desember 2022	Rp	114.605.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**Rp**	**-**

Aset Lain-Lain
Rp.277.324.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.277.324.000,- dan Rp.4.046.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**4.046.000**
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap/Henti Guna	Rp	4.487.419.800
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	(4.214.141.800)
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**277.324.000**
Akumulasi Penyusutan	Rp	(246.893.254)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**Rp**	**30.430.746**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. (395.975.000)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.(395.975.000) dan Rp.(118.651.000). Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	**395.975.000**	**-365.544.254**	**30.430.746**
Software	118.651.000	-118.651.000	**0**
Aset Tetap Henti Guna	277.324.000	-246.893.254	**30.430.746**
Aset Lain-lain	**0**	**0**	**0**
Jumlah	**395.975.000**	**-365.544.254**	**30.430.746**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.55.900

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.55.900 dan Rp.15.824.900. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp	-
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp	55.900
3	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp	-
Total		**Rp**	**55.900**

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	-	-
Instansi Pemerintah Lainnya	-	-
Badan Lainnya	-	-
Total	**-**	

Beban yang Masih harus Dibayar Rp.0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan TA 2021

Keterangan	2022	2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.28 Ekuitas

Ekuitas Rp. 37.514.601.184

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.37.514.601.184 dan Rp.33.172.660.294. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp.231.974.950

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.231.974.950 dan Rp.13.987.200. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian PNBP TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	231.974.950	13.987.200	1.558,48
Jumlah	**231.974.950**	**13.987.200**	1.558,48

Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pendapatan yang berasal dari biaya sewa rumah dinas dan persekot gaji.

Beban Pegawai Rp.3.266.146.846

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.266.146.846,- dan Rp.3.169.619.126,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.170.570.045	1.105.899.990	6
Beban Tunjangan-Tunjangan	2.095.576.801	2.063.719.136	2
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	#DIV/0!
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**3.266.146.846**	**3.169.619.126**	3

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp.46.679.017

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.46.679.017,- dan Rp.46.643.603,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	46.679.017	46.643.603	0,08
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	**46.679.017**	**46.643.603**	0,08

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp.1.368.951.470

Beban Barang dan Jasa T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.368.951.470 dan Rp.754.644.568. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	606.362.200	437.391.668	38,63
Beban Sewa	0	0	#DIV/0!
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	6.114.400	7.869.400	-22,30
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50.040.000	50.040.000	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	27.880.396	69.453.825	-59,86
Beban Operasional _Penanganan pandemi covid-19	12.378.374	3.498.200	253,85
Beban Bahan	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Op. Lainnya	0	3.400.000	-100,00
Beban Barang Non Op. Lainnya - Penanganan Covid-19	0	5.000.000	-100,00
Beban Langganan Listrik	176.452.842	166.486.668	5,99
Beban Langganan Telepon	1.109.158	1.004.807	10,39
Beban Sewa	483.614.100	0	#DIV/0!
Beban Jasa Penanganan Covid-19	5.000.000	10.500.000	-52,38
Jumlah	**1.368.951.470**	**754.644.568**	81,40

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.232.416.461

Beban Pemeliharaan T.A 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.232.416.461,- dan Rp.457.719.243,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk T.A 2022 dan T.A 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.190.400	228.509.251	-81,54
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61.636.000	81.964.000	-24,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109.659.600	128.363.375	-14,57
Beban Penanganan Covid-19	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan			#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	18.930.461	18.882.617	0,25
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**232.416.461**	**457.719.243**	-49,22

Beban Perjalanan Dinas
Rp.152.230.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.152.230.000 dan Rp.71.780.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	146.830.000	66.380.800	121,19
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**152.230.000**	**71.780.800**	112,08

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk T.A 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp.0

Beban Bantuan Sosial T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk T.A 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.253.118.299

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk T.A 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.253.118.299,- dan Rp.374.602.358. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk T.A 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	149.032.847	201.312.848	(26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	101.292.131	170.891.394	(41)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	2.398.116	2.398.116	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	395.205	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	**253.118.299**	**374.602.358**	(32)
	-		
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	**-**	**-**	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**253.118.299**	**374.602.358**	(32)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk T.A 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. (3.305.985.072)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional T.A 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Penjualan Peraralatan dan mesin	0	0	#DIV/0!
Penjualan BMN	-3.305.985.072	0	-
Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-3.305.985.072**	**0**	#DIV/0!

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Defisit Pos Luar Biasa Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk T.A 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.33.172.660.294

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.33.172.660.294 dan Rp.33.234.084.108.

Defisit LO

Rp(8.610.102.215)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar Rp.(8.610.102.215) dan Rp.(4.861.022.498). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	**-**

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi NilaiAset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	**-**

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp.0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas

Rp. 12.954.725.705

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.12.954.725.705,- dan Rp.4.799.598.684,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(231.974.950)
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.079.289.405
Transfer Masuk	124.780.000
Transfer Keluar	(17.368.750)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**12.954.725.705**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.(231.974.950,-) sedangkan DKEL sebesar Rp.13.079.289.405-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Transfer Masuk	BUA MARI	124.780.000
3	Transfer Keluar	BUA MARI	(17.368.750)
	Jumlah		**107.411.250**

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2022. Hibah langsung yang diterima yaitu sebuah Bangunan Mesjid yang berdiri di atas tanah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp. 37.514.601.184

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.37.514.601.184,- dan Rp.33.172.659.444,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap laporan keuangan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu :

Satker	Jabatan	Nama
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	Kuasa Pengguna Anggaran	Hj. Sitti Junaedah, SE.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Imelda Christine, SE.
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Dian Puspita
	Bendahara Pengeluaran	Wardi, SE.
	Bendahara Penerima	Aditya Reza Gusnanda,A.md
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Ira Rahmawati, ST.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Armortisasi, Akumulasi Penyusutan/Armortasi dan Nilai Buku aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31-12-2020	Beban Peny. 31-12-2020	Akm. Peny. 31-12-2020	Total Akm. Peny 31-12-2020	Nilai Buku 31-12-2020
A	**Tanah**							
1	Tanah	-	**28.200.151.000**	-	-	-		**28.200.151.000**
	Jumlah		**28.200.151.000**	-	-	-		**28.200.151.000**
B	**Peralatan dan Mesin**							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	354.124.941	354.124.941	0	-	354.124.941	-
2	Alat Kantor	63	257.784.268	233.623.268	6.944.000	-	240.567.268	**17.217.000**
3	Alat Rumah Tangga	206	838.152.346	730.264.346	27.972.000	-	758.236.346	**79.916.000**
4	Alat Studio	13	68.176.250	64.375.250	1.520.400	-	65.895.650	**2.280.600**
5	Alat Komunikasi	14	22.930.000	22.930.000	0	-	22.930.000	-
6	Peralatan Pemancar	0	0	0	0	-	-	-
7	Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	0	0	0	-	-	-
8	Alat Laboratorium Fisika	0	0	-238.500.000	238.500.000	-	-	-
9	Komputer Unit	68	878.080.700	620.155.625	77.454.050	-	697.609.675	**180.471.025**
10	Peralatan Komputer	44	318.188.815	255.679.095	32.661.147	-	288.340.242	**29.848.573**
11	Peralatan Olah Raga	0	0	0	0	-		-
	Jumlah		**2.737.437.320**	**2.042.652.525**	**385.051.597**	-	**2.427.704.122**	**309.733.198**
C	**Gedung dan Bangunan**							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	-596.404.425	596.404.425	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8	731.044.000	108.890.840	24.197.966	-	133.088.806	**597.955.194**
3	Tugu/Tanda Batas	1	374.745.200	55.787.255	-22.060.187	-	33.727.068	**341.018.132**
	Jumlah		**1.105.789.200**	**(431.726.330)**	**598.542.204**	-	**166.815.874**	**938.973.326**
D	**Jaringan**							-
1	Jaringan Listrik	1	95.350.000	30.600.888	2.398.116	-	32.999.004	**62.350.996**
2	Jaringan Telepon	0	0	0	0	-		-
	Jumlah		**95.350.000**	**30.600.888**	**2.398.116**	-	32.999.004	**62.350.996**
E	**Konstruksi dalam Pengerjaan**							-
1	KDP Bangunan	1	0	-	-	-		-
	Jumlah		**0**	-	-	-		-
F	**Aset Tetap Lainnya**							-
1	Barang bercorak kesenian	1	15.064.000	15.064.000	0	-	15.064.000	-
2	Buku dan Koleksi Kepustakaan	-	**190.000**	-	-	-	-	**190.000**
	Jumlah		**15.254.000**	**15.064.000**	-	-	15.064.000	**190.000**
G	**Aset Tetap Yang tidak digunakan**	4	277.324.000	4.046.000	242.847.254	-	246.893.254	**30.430.746**
H	**ATB Yang tidak digunakan**		0	-	-	-	-	-
	Jumlah		**277.324.000**	**4.046.000**	**242.847.254**	-	246.893.254	**30.430.746**
Total			**32.431.305.520**	**1.660.637.083**	**1.228.839.171**	**0**	**2.889.476.254**	**29.541.829.266**

*) Beban amortisasi

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No.	Uraian	Lokasi	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket.
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-

Lampiran III : Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 31 Desember 2022

No.	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1.	-	-	-	Rp. 0	-	-	-